

**PENGARUH KOMPETENSI APARAT PENGELOLA DANA
DESA, KOMITMEN ORGANISASI PEMERINTAH DESA,
PARTISIPASI MASYARAKAT, PEMANFAATAN TEKNOLOGI
INFORMASI, DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL
TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA
(Studi Empiris Pada Desa Di Kecamatan Bandongan)**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mencapai Derajat Sarjana S-1**



Disusun Oleh:
Tika Rismawati
NIM.15.0102.0163

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
TAHUN 2019**

**PENGARUH KOMPETENSI APARAT PENGELOLA DANA
DESA, KOMITMEN ORGANISASI PEMERINTAH DESA,
PARTISIPASI MASYARAKAT, PEMANFAATAN TEKNOLOGI
INFORMASI, DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL
TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA
(Studi Empiris Pada Desa Di Kecamatan Bandongan)**

SKRIPSI



**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mencapai Derajat Sarjana S-1**

Disusun Oleh:
Tika Rismawati
NIM.15.0102.0163

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
TAHUN 2019**

SKRIPSI

SKRIPSI

PENGARUH KOMPETENSI APARAT PENGELOLA DANA DESA, KOMITMEN ORGANISASI PEMERINTAH DESA, PARTISIPASI MASYARAKAT, PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA
(Studi Empiris Pada Desa Di Kecamatan Bandonean)

Dipersiapkan dan disusun oleh:

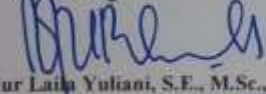
Tika Rismawati

NPM 15.0102.0163

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal ..25 Juli 2019.....

Susunan Tim Penguji

Pembimbing



Nur Laila Yuliani, S.E., M.Sc., Ak

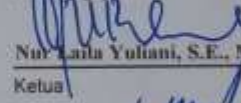
Pembimbing I



Yulinda Devi Pranita, S.E., M.Sc., Ak


Pembimbing II

Tim Penguji



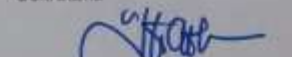
Nur Laila Yuliani, S.E., M.Sc., Ak

Ketua



Wawan Sadyo Nugroho, S.E., M.Si., Ak, CA

Sekretaris



Veni Soraya Dewi, S.E., M.Si

Anggota

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
Untuk memperoleh gelar Sarjana S1

Tanggal, 15 AUG 2019


Dra. Marlina Kurnia, MM

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis

SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Tika Rismawati
NIM : 15.0102.0163
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya susun dengan judul:

**PENGARUH KOMPETENSI APARAT PENGELOLA DANA DESA,
KOMITMEN ORGANISASI PEMERINTAH DESA, PARTISIPASI
MASYARAKAT, PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP AKUNTABILITAS
PENGELOLAAN DANA DESA
(Studi Empiris Pada Desa Di Kecamatan Bandongan)**

Adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat dari skripsi orang lain. Apabila kemudian hari pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut predikat kelulusan dan gelar keserjamaanya)

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat dipergunakan bilamana diperlukan.

Magelang, Juli 2019

Pembuat Pernyataan,



Tika Rismawati

NIM. 15.0102.016

RIWAYAT HIDUP

Nama : Tika Rismawati
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat,tanggal lahir : Magelang, 04 Desember 1995
Agama : Islam
Status : Sudah Menikah
Alamat Rumah : Dsn. Campursari B RT 04/RW 01, Gandusari,
Bandongan, Magelang.
Alamat Email : tikarisma12@gmail.com

Pendidikan Formal

SD (2002-2007) : SD Negeri Gandusari 1
SMP (2007-2010) : SMP Negeri 1 Bandongan
SMA (2010-2013) : SMK Negeri 2 Kota Magelang
PT (2015-2019) : S1 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Muhammadiyah Magelang

Magelang, Juli 2019
Peneliti

Tika Rismawati
NIM. 15.0102.0163

MOTTO

Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah kamu berharap.

(QS. Asy Syarh : 6-9)

Ketika semua hal tidak sejalan dengan keinginan, ingatlah bahwa sebuah pesawat terbang beroperasi dengan melawan arah angin, bukan dengan mengikutinya

(Henry Ford)

Kesuksesan bukan tentang seberapa banyak uang yang kamu hasilkan, tapi seberapa besar kamu membawa perubahan untuk hidup orang lain

(Michelle Obama)

Cukuplah Allah sebagai Penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung

(QS. Ali Imran :173)

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr, wb.

Puji dan syukur Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya. Atas karunianya penulis dapat menyelesaikan penelitian dan skripsi yang berjudul **Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Desa Di Kecamatan Bandongan).**

Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih derajat Sarjana Ekonomi program Strata Satu (S-1) Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Magelang. Selama penelitian dan penyusunan laporan penelitian dalam skripsi ini, penulis tidak luput dari kendala. Kendala tersebut dapat diatasi penulis berkat adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih sebesar besarnya kepada:

1. Ibu Nur Laila Yuliani, S.E., M.Sc., Ak selaku Ketua prodi Studi Akuntansi dan dosen pembimbing 1 (satu) yang telah mengorbankan waktu, tenaga, pikiran untuk memberikan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Yulinda Devi Pramita, S.E., M.Sc. selaku dosen pembimbing 2 (dua) yang telah mengorbankan waktu, tenaga, pikiran untuk memberikan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Wawan Sadya Nugroho, S.E, M.Si., Ak, CA selaku dosen penguji 1(satu) yang sudah membantu memberikan saran terhadap perbaikan skripsi ini.
4. Ibu Veni Soraya, SE., M.Si. selaku dosen penguji 2 (dua) yang sudah membantu memberikan saran terhadap perbaikan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Pengajar yang telah memberikan bekal ilmu yang tak ternilai harganya dan telah membantu kelancaran selama menjalankan studi di Universitas Muhammadiyah Magelang.
6. Ayahanda, Ibu, Adik, dan Suami tercinta terimakasih atas do'a dan kasih sayang yang tak terhingga dan selalu memberikan yang terbaik.

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada semua pihak atas bantuan yang diberikan kepada penulis. Akhirnya penulis hanya dapat mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya.

Magelang, Juli 2019
Peneliti

Tika Rismawati
NPM. 15.0102.0163

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Pengesahan	ii
Halaman Pernyataan Keaslian Skripsi.....	iii
Halaman Riwayat Hidup	iv
Motto	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi.....	vii
Daftar Tabel	ix
Daftar Tabel	x
Daftar Lampiran	xi
Abstrak	xii
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Kontribusi Penelitian.....	11
E. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Telaah Teori	14
1. <i>Teori Stewardship</i>	14
2. <i>Pemerintah Desa</i>	15
3. <i>Alokasi Dana Desa (ADD)</i>	16
4. <i>Akuntabilitas</i>	18
5. <i>Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa</i>	19
6. <i>Komitmen Organisasi Pemerintah Desa</i>	20
7. <i>Partisipasi Masyarakat</i>	20
8. <i>Pemanfaatan Teknologi Informasi</i>	22
9. <i>Sistem Pengendalian Internal</i>	22
B. Telaah Penelitian Sebelumnya	23
C. Perumusan hipotesis.....	27
D. Model Penelitian	35

BAB III METODE PENELITIAN	
A. Populasi dan Sampel	36
B. Data Penelitian	37
C. Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel	38
D. Metode Analisis Data.....	40
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Sampel Penelitian dan Tingkat Pengembalian.....	46
B. Statistik Deskriptif Responden.....	46
C. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian.....	48
D. Uji Kualitas Data.....	50
E. Analisis Regresi Linier Berganda	53
F. Uji Hipotesis.....	53
G. Pembahasan.....	58
BAB V KESIMPULAN	
A. Kesimpulan	66
B. Keterbatasan.....	67
C. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN.....	74

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Rincian Alokasi Dana Desa Kabupaten Magelang.....	3
Tabel 1.2 Rincian Alokasi Dana Desa Kecamatan Bandongan.....	4
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	23
Tabel 3.1 Variabel penelitian dan Pengukuran variabel	38
Tabel 4.1 Sampel penelitian & Tingkat penelitian.....	46
Tabel 4.2 Profil Responden	47
Tabel 4.3 Statistik Deskriptif.....	48
Tabel 4.4 Hasil Uji Validitas	50
Tabel 4.5 <i>Cross Loading</i>	51
Tabel 4.6 Hasil Uji Reliabilitas	52
Tabel 4.7 Hasil Uji Regresi.....	53
Tabel 4.8 Nilai Koefisien Determinan (R^2).....	54
Tabel 4.9 Nilai Analisis Uji F.....	54
Tabel 4.10 Nilai Analisis Uji t.....	55

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Model Penelitian	35
Gambar 3.1 Penerimaan Uji F	44
Gambar 3.2 Penerimaan Uji t.....	45
Gambar 4.1 Nilai kritis Uji F.....	55
Gambar 4.2 Nilai kritis Uji t.....	56
Gambar 4.3 Nilai kritis Uji t.....	56
Gambar 4.4 Nilai kritis Uji t.....	57
Gambar 4.5 Nilai kritis Uji t.....	57
Gambar 4.6 Nilai kritis Uji t.....	58

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner.....	74
Lampiran 2 Daftar Desa Di Kecamatan Bandongan.....	80
Lampiran 3 Daftar Sampel	81
Lampiran 4 Tabulasi Data Pengisian Kuesioner sebelum validitas....	82
Lampiran 5 Tabulasi Data Pengisian Kuesioner setelah validitas	99
Lampiran 6 Hasil uji Statistik Deskriptif.....	109
Lampiran 7 Hasil Uji Validitas.....	110
Lampiran 8 Hasil Uji Reliabilitas	118
Lampiran 9 Hasil Uji Regresi Analisis Berganda	121
Lampiran 10 Surat Ijin Riset.....	122
Lampiran 11 Bukti Riset.....	124

ABSTRAK

**Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa
(Studi Empiris Pada Desa Di Kecamatan Bandongan)**

**Oleh :
Tika Rismawati**

Akuntabilitas adalah bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Akuntabilitas pengelolaan dana desa sudah menjadi sebuah tuntutan bagi pemerintah desa. Adanya tuntutan ini sebagai akibat implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Metode pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* dengan jumlah sampel 105 perangkat desa di desa se-Kecamatan Bandongan. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat, Pemanfaatan Teknologi Informasi, berpengaruh positif, sedangkan Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa dan Sistem Pengendalian Internal tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Dana Desa.

Kata kunci : *Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Internal, Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.*

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang (UU) No. 6 Tahun 2014 tentang desa menjadi fokus utama pemerintah Indonesia dalam meningkatkan pembangunan nasional. Pembangunan tersebut ditempuh dengan cara memberikan kewenangan kepada setiap desa untuk mengelola dan menjalankan sistem pemerintahannya sendiri. Wewenang tersebut diberikan dari pusat kepada daerah yang biasa disebut dengan *desentralisasi*. Kewenangan yang diberikan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan agar menjangkau seluruh lapisan masyarakat Indonesia dan dapat menata desa dengan baik. Pembangunan yang dicanangkan pemerintah melalui desa direalisasikan dengan pemberian alokasi dana desa kepada seluruh desa di Indonesia.

Secara nasional, pemerintah telah mengalokasikan anggaran dana desa dengan nilai yang besar untuk sebuah program/kebijakan yang baru. Berdasarkan data pada Kementerian Keuangan RI (Nota Keuangan), jumlah dana desa yang telah dianggarkan oleh pemerintah dalam 3 (tiga) tahun terakhir adalah sebesar Rp127,75 Triliun. Rincian dana sebagai berikut: pada tahun 2015 sebesar Rp20,77 Triliun, tahun 2016 sebesar Rp46,98 Triliun, dan tahun 2017 sebesar Rp60 Triliun. Dana desa diharapkan dapat membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Secara khusus dana desa diharapkan dapat mengurangi jumlah desa tertinggal sampai 5.000 desa, dan

meningkatkan jumlah desa mandiri sedikitnya 2.000 desa pada tahun 2019. Fakta menunjukkan bahwa pada tahun 2015 jumlah desa mandiri sebanyak 3.608 dari 73.709 atau 4,89% dan jumlah desa tertinggal sebanyak 33.592 dari 73.709 atau 45,57%. (Kementerian Desa PDTT RI, 2016).

Terdapat 25 kasus pada 12 desa terkait dana desa di Jawa Tengah pada periode Juni 2017 sampai Oktober 2018 diperiksa lebih khusus oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ada empat persoalan yang melatar belakangi terjadinya permasalahan pengelolaan keuangan desa yaitu penyalahgunaan wewenang kepala desa, penggelapan dana, adanya surat pertanggung jawaban (SPJ) fiktif dan kualitas serta kuantitas pekerjaan fisik yang tidak sesuai aturan. Persoalan akhirnya berpotensi merugikan keuangan negara. Peran dana desa sangat penting untuk kemajuan desa, sehingga kepala desa harus mampu memaksimalkan dana desa yang ada, tentunya dengan membuat program yang berorientasi kepada kesejahteraan masyarakat (semarang.bpk.go.id).

Bantuan dana desa di Kabupaten Magelang pada tahun 2017, sudah mengalami peningkatan yang signifikan, tetapi masih sering ditemui kendala administrasi. Hal tersebut menjadi kewajiban pemerintah Kabupaten untuk melakukan pembinaan kepada desa, melakukan monitoring dalam penggunaan dana desa, dan memberikan sanksi atas penggunaan dana desa yang tidak sesuai dengan ketentuan. Setiap desa mempunyai kewajiban untuk tertib administarsi dalam mempertanggungjawabkan dana desa, dengan memahami aturan atau regulasi terkait pengelolaan dana desa (inspektorat.magelangkab.go.id).

Pada tahun 2018 Kabupaten Magelang menerima dana desa sebesar Rp323.812.423.000 yang telah disalurkan ke 367 desa yang tersebar di 21 Kecamatan. Di bawah ini merupakan rincian dana desa per Kecamatan di Kabupaten Magelang tahun 2018.

Tabel 1.1
Rincian Alokasi Dana Desa Kabupaten Magelang

No	Kecamatan	Anggaran Dana Desa	Selisih Anggaran	Realisasi Dana Desa
1	Grabag	26.594.007.000	24.007.000	26.570.000.000
2	Kajoran	25.138.293.000	4.293.000	25.134.000.000
3	Kaliangkrik	20.336.583.000		20.336.583.000
4	Windusari	18.949.088.000	28.988.000	18.920.100.000
5	Pakis	18.851.141.000	7.741.000	18.843.400.000
6	Tegalrejo	17.695.398.000		17.695.398.000
7	Salaman	17.681.511.000		17.681.511.000
8	Borobudur	16.818.081.000		16.818.081.000
9	Candimulyo	16.283.778.000	11.378.000	16.272.400.000
10	Secang	15.888.083.000	38.083.000	15.850.000.000
11	Ngablak	14.730.459.000	5.459.000	14.725.000.000
12	Srumbung	13.768.909.000		13.768.909.000
13	Tempuran	13.653.395.000	7.895.000	13.645.500.000
14	Sawangan	13.525.412.000	5.012.000	13.520.400.000
15	Bandongan	12.515.074.000	165.192.000	12.349.882.000
16	Dukun	12.508.751.000	7.743.000	12.501.008.000
17	Mungkid	11.755.338.000	4.038.000	11.751.300.000
18	Mertoyudan	10.446.493.000		10.446.493.000
19	Muntilan	10.193.906.000		10.193.906.000
20	Salam	9.904.183.000	4.083.000	9.900.100.000
21	Ngluwar	6.574.540.000		6.574.540.000
	Jumlah	323.812.423.000	313.912.000	323.498.511.000

Sumber: Peraturan Bupati nomor 14 tahun 2018

Kecamatan Bandongan merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Magelang yang terdiri dari 14 desa, yang memperoleh anggaran dana desa dari pemerintah pusat. Berdasarkan Tabel 1.1, menunjukkan bahwa dana desa di Kecamatan Bandongan masuk dalam tingkat penyerapan dana desa paling

rendah, dibuktikan dari adanya selisih dana desa lebih Anggaran (SilPA) yang mencapai Rp.165.192.000. Di bawah ini merupakan rincian dana desa se-Kecamatan Bandongan tahun 2018.

Tabel 1.2
Rincian Alokasi Dana Desa

No	Desa	Anggaran Dana Desa	SilPA	Realisasi Dana Desa
1	Bandongan	799.820.000	1.691.875	798.128.125
2	Salamkanci	864.926.000		864.926.000
3	Sukosari	773.196.000	15.000.000	758.196.000
4	Tonoboyo	790.937.000		790.937.000
5	Gandusari	1.006.664.000		1.006.664.000
6	Sidorejo	818.438.000		818.438.000
7	Trasan	901.194.000		901.194.000
8	Banyuwangi	980.680.000	148.500.000	832.120.000
9	Kedungsari	773.463.000		773.463.000
10	Sukodadi	949.538.000		949.538.000
11	Kebonagung	866.338.000		866.338.000
12	Kalegen	803.185.000		803.185.000
13	Ngepanrejo	1.161.832.000		1.161.832.000
14	Rejosari	1.024.883.000		1.024.883.000
	Jumlah	12.515.074.000	165.191.875	12.349.882.125

Sumber: Pemerintahan Kecamatan Bandongan

Hasil wawancara dengan bapak Muhamad Imam selaku pendamping desa di Kecamatan Bandongan menyatakan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan tersebut masih belum optimal. Hal tersebut dikarenakan terdapat beberapa permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan dana desa, antara lain dari 14 desa terdapat tiga (3) desa yang mempunyai Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SilPA). Hal tersebut terjadi kaena adanya kegiatan perjalanan dinas luar daerah yang tidak terserap sehingga menjadi SilPA. Keterlambatan penyampaian dokumen Pelaksanaan Anggaran (DIPA) menyebabkan pemerintah desa tidak segera melakukan pengadaan barang dan

jasa, akibatnya proses pengadaan menjadi tertunda dan menimbulkan tidak terealisasinya program yang telah dilaksanakan.

Kurangnya kompetensi aparatur desa, menyebabkan masalah pada bagian administrasi pengelolaan dana desa yang mengakibatkan terlambatnya pencairan dana desa periode berikutnya. Program/kegiatan desa cenderung dibuat atau di laksanakan pada saat anggaran desa akan dicairkan. Pengawasan yang dilakukan terhadap keuangan desa belum optimal dilakukan secara preventif dan represif, serta kurangnya partisipasi masyarakat dalam menjalankan kegiatan dana desa yang dikarenakan kemampuan berpartisipasi masyarakat yang terbatas dan keinginan berpartisipasi yang rendah.

Proses pengelolaan dana desa telah dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 tentang pengelolaan dana desa. Pengelolaan dana desa dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban. Semua proses pengelolaan dana desa harus didasari asas transparansi, akuntabel dan partisipatif. Pengelolaan dana desa dituntut untuk memenuhi adanya suatu aspek tata pemerintahan yang baik (*good governance*), salah satu pilarnya adalah akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan kewajiban bagi pemerintah desa untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, serta mengungkapkan setiap aktivitas yang dilakukan kepada pemerintah pusat dan masyarakat. Akuntabilitas yang baik, akan menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan dapat meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat sehingga alokasi dana desa tersebut dapat memberikan dampak yang besar bagi pembedayaan masyarakat.

Banyak faktor yang yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa, antara lain kompetensi aparatur desa. Penelitian Aulia (2018) menyatakan bahwa semakin baik kompetensi aparat pengelola dana desa maka semakin baik pula akuntabilitas pengelolaannya. Hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan Dewi dan Gayatri (2019), Perdana (2018), Supadmi dan Dharma (2018), Suherwan dan Kamaliah (2018), Mada, *et al.*, (2017), Setiana dan Yuliani (2017). Berbeda dengan penelitian Perdana (2018), Widyatama dan Novita (2017) yang menyatakan bahwa kompetensi aparatur dari pemerintah desa secara signifikan tidak memengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa. Hal tersebut disebabkan karena rendahnya kompetensi maupun tingkat pendidikan yang merupakan ujung tombak pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD).

Faktor lain yang mempengaruhi akuntabilitas adalah komitmen organisasi. sesuai dengan penelitian yang dilakukan Aulia (2018) menyatakan bahwa komitmen organisasi yang bagus terhadap publik diilustrasikan memberikan manfaat terhadap sistem akuntabilitas. Semakin tinggi komitmen pemerintah desa, maka pengelolaan dana desa semakin akuntabel. Hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan Suherwan dan Kalimah (2017) dan Mada, *et al.*, (2017). Berbeda dengan penelitian Putu dan Rosiana (2016), yang menyatakan bahwa komitmen organisasi tidak memoderasi pengaruh akuntabilitas terhadap laporan audit BPK RI. Perdana (2018) juga menyatakan bahwa komitmen organisasi tidak tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal tersebut dikarenakan belum optimalnya dukungan

dan perhatian dari pihak organisasi. Selain itu tugas yang terlaksana dengan baik, belum sepenuhnya mendapatkan apresiasi dan reward dari pihak pemerintah sebagai bentuk kepedulian terhadap organisasi.

Partisipasi Masyarakat juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian yang dilakukan Aulia (2018) menyatakan bahwa peran masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan dapat meningkatkan kinerja pemerintah secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas pengelolaan dana desa. Semakin baik partisipasi masyarakat, maka pengelolaan dana desa semakin Akuntabel. Hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan Dewi dan Gayatri (2019), Perdana (2018) dan Mada, *et al.*, (2017). Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Mudarosatun, (2017) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas dana desa dikarenakan masyarakat belum begitu paham mengenai alokasi dana desa, masyarakat hanya sekedar mengikuti apa yang di intruksikan tanpa mengetahui berapa besar dana desa yang diperoleh serta kegunaanya.

Prinsip akuntabilitas dapat diterapkan dengan baik, apabila didukung oleh sarana teknologi informasi yang memadai dan dapat diandalkan. Penelitian Aulia (2018) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Semakin bagus pemanfaatan teknologi informasi, maka pengelolaan dana

desa semakin akuntabel. Hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan Perdana (2018) dan Komarasari (2017). Berbeda dengan penelitian Riandani (2017) yang menyatakan bahwa teknologi informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas laporan keuangan daerah. Hal tersebut dikarenakan masih banyak aparat yang menggunakan sistem manual dalam pencatatan laporan keuangan. Selain itu minimnya sumber daya manusia yang mampu menggunakan sistem secara terkomputerisasi.

Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang desa menjelaskan bahwa alokasi dana desa harus digunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan undang-undang dan ketentuan pemerintah yang berlaku. Namun, dalam penggunaan alokasi dana desa ini rawan terhadap penyelewengan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu. Sistem pengendalian internal yang baik diperlukan untuk mengawasi pelaksanaan tersebut. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan Yesinia, *et al.*, (2018), Rosyidi (2018), Widyatama dan Novita (2017) menyatakan bahwa semakin tinggi pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan anggaran dana desa maka akan semakin meningkatkan akuntabilitas pengelolaan anggaran dana desa. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Abubakar, *et al.*, (2017) yang di lakukan di Negara Borneo, menunjukkan bahwa kegiatan pengendalian internal dan transparansi tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan di pemerintah daerah. Karena pemerintah negara Borno melalui Kementerian Urusan Pemerintah Daerah belum meninjau secara mendalam mengenai kebijakan dan prosedur kegiatan pengendalian internal melalui reformasi untuk memperkuat

efektivitas akuntabilitas keuangan dan transparansi bidang pemerintah daerah di negara bagian.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Aulia (2018) yang meneliti tentang pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten 50 Kota. Persamaan penelitian ini adalah menggunakan semua variabel yang ada serta metode yang digunakan. Sedangkan perbedaannya adalah **Pertama** menambahkan variabel sistem pengendalian internal karena dengan penggunaan sistem pengendalian internal, diharapkan mampu memperbaiki kualitas penyusunan administrasi pengelolaan dana desa sehingga dapat menghindari keterlambatan pencairan dana desa periode berikutnya. Selain itu, pengawasan yang dilakukan terhadap keuangan desa bisa lebih dioptimalkan. Sistem pengendalian internal yang baik dapat mencegah pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat memperoleh efisiensi, efektivitas, dan mencegah terjadinya kerugian dana desa. Penambahan variabel sistem pengendalian internal ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan Rosyidi (2018), Yesinia *et al.*, (2018), Widyatama dan Novita (2017) yang menyatakan semakin baik pengendalian internal maka semakin meningkatkan akuntabilitas pengelolaan anggaran dana desa.

Kedua objek penelitian ini adalah desa se-Kecamatan Bandongan karena adanya permasalahan kurangnya kompetensi sumber daya dalam pengelolaan

dasa desa. Aparatur yang rata-rata hanya lulusan SMP /SMA dan sudah tua menjadi terjadi keterlambatan pencairan dana desa. Data kepegawaian di Kecamatan Bandongan yang menyatakan bahwa dari 181 perangkat desa terdapat 61 atau 33,7% perangkat desa yang lulusan SMP, 100 atau 55,2% perangkat desa lulusan SMA dan sisanya 11 % merupakan lulusan D3/S1. Sedangkan untuk aparat desa yang sudah mempunyai umur lebih dari 45 tahun terdapat 75 atau 41% perangkat desa yang masih efektif menjabat di pemerintah desa.

Pengawasan yang dilakukan terhadap keuangan desa belum optimal sehingga, masih terdapat kelemahan dalam implementasi pelaporan keuangan desa dan memicu ketidakpatuhan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meskipun pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari dana desa telah banyak menunjukkan peningkatan pada berbagai aspek, namun hanya sebagian masyarakat yang aktif terhadap kegiatan/program desa dalam meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan desa, sehingga inisiatif masyarakat dalam menyampaikan ide-ide strategis tidak sepenuhnya terpenuhi.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah kompetensi aparat pengelola dana desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
2. Apakah komitmen organisasi pemerintah desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?

3. Apakah partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
4. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
5. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dan menguji secara empiris pengaruh kompetensi aparat pengelola dana desa dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa.
2. Untuk menganalisis dan menguji secara empiris pengaruh komitmen organisasi pemerintah desa dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa.
3. Untuk menganalisis dan menguji secara empiris pengaruh partisipasi masyarakat dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa.
4. Untuk menganalisis dan menguji secara empiris pengaruh pemanfaatan teknologi informasi dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa.
5. Untuk menganalisis dan menguji secara empiris pengaruh sistem pengendalian internal dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa.

D. Kontribusi Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi perkembangan konsep mengenai pelaksanaan pemerintah daerah, khususnya mengenai akuntabilitas pengelolaan dana desa.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu acuan untuk penelitian berikutnya yang sejenis.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah Kabupaten, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan mengenai akuntabilitas dana desa.
- b. Bagi Pemerintah Desa, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan mengenai akuntabilitas dana desa.
- c. Bagi Masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat agar mengetahui akuntabilitas dana desa.
- d. Bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai penambah wawasan baru mengenai pemerintah desa dan pengelolaan akuntabilitas dana desa sekaligus sumber bahan baru dalam Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

E. Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan dibahas dalam 5 (lima) bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Bab ini akan menguraikan mengenai teori sebagai dasar untuk menganalisa pokok – pokok masalah dalam penelitian berupa telaah teori, telaah penelitian terdahulu, perumusan hipotesis, dan model penelitian.

BAB III METODA PENELITIAN

Berisi gambaran dan tahapan penelitian yang menjelaskan tentang populasi, sampel, metode pengambilan sampel, definisi operasional, pengukuran variabel, dan metode analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Berisi analisis data dan pembahasan yang menjelaskan seputar deskripsi data, deskripsi responden, deskripsi variabel penelitian, analisis deskriptif, uji validitas, uji reliabilitas, analisis regresi, dan pengujian hipotesis.

BAB V KESIMPULAN

Bab ini merupakan bab akhir dari penyusunan skripsi yang berisi kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

A. Telaah Teori

1. *Teori Stewardship*

Menurut Donaldson & Davis (1991), teori *stewardship* adalah teori yang menggambarkan situasi para manajer yang tidak termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Teori ini mempunyai dasar psikologi dan sosiologi yang telah dirancang para eksekutif dalam perusahaan atau organisasi sebagai pelayan dapat termotivasi untuk bertindak dengan cara terbaik sesuai keinginan pemerintah pusat dan masyarakat. Teori *stewardship* mengasumsikan bahwa adanya hubungan kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi, yang menggambarkan maksimalisasi tujuan organisasi. Teori *stewardship* lebih cocok digunakan pada instansi pemerintah yang tidak berorientasi pada laba namun lebih condong kepada pelayanan yang baik untuk masyarakat.

Implikasi teori *stewardship* terhadap penelitian ini, dapat menjelaskan eksistensi pemerintah desa (*steward*) sebagai suatu lembaga yang dapat dipercaya dan bertindak sesuai dengan kepentingan publik dengan melaksanakan tugas dan fungsinya dengan tepat untuk kesejahteraan masyarakat. Pemerintah desa melaksanakan tugasnya dalam membuat pertanggungjawaban keuangan berupa penyajian laporan keuangan yang

akuntabel dan transparan sesuai dengan karakteristik laporan keuangan (relevan, andal, dapat dipahami dan dapat dibandingkan). Untuk mewujudkan akuntabilitas tersebut, dibutuhkan kompetensi aparat pengelola dana desa yang memadai. Wujud dari akuntabilitas yang diciptakan pemerintah desa menimbulkan *responsiveness* kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa memberikan tanggapan atau masukan dalam meningkatkan pembangunan dan pengambilan keputusan untuk kedepannya.

Laporan keuangan yang akuntabel dan transparan dapat terwujud dengan adanya kontrol baik sehingga menghasilkan laporan informasi keuangan yang berkualitas sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat. Teori ini juga mengharapkan komitmen organisasi yang berada didalam perusahaan lebih menjunjung tujuan perusahaan dibandingkan dengan tujuan perorangan agar mencapai sasaran. Kesadaran agar aparat yang memiliki komitmen organisasi yang tinggi akan melakukan segala kegiatan yang dilakukannya dalam organisasi untuk mewujudkan pelayanan kepada publik agar menjadi lebih baik. Sedangkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan dana desa akan mempermudah aparat dalam mengolah dan mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilakukan kepada masyarakat, sehingga aparat akan dengan mudah menjalankan kewajibannya sebagai *steward* untuk memberikan pelayanan kepada publik.

2. Pemerintah Desa

Pemerintahan Desa merupakan bagian dari Pemerintahan Nasional yang penyelenggaraannya ditujukan pada pedesaan. Pemerintahan Desa

adalah suatu proses dimana usaha-usaha masyarakat desa yang bersangkutan dipadukan dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat (Rosyidi, 2018). Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 menjelaskan bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa adalah kepala desa atau perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

3. Alokasi Dana Desa (ADD)

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, alokasi dana desa merupakan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) yang pembagiannya untuk desa secara proporsional. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa disebutkan bahwa alokasi dana desa berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh persen).

Kuangan desa pada dasarnya merupakan sub sistem dari keuangan negara. Keuangan desa didefinisikan sebagai semua hak dan kewajiban desa

yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik desa dan berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dari sifat pengelolaannya, keuangan desa dapat dibagi menjadi keuangan desa yang sifat pengelolaannya dilakukan secara langsung yang berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan keuangan desa yang sifat pengelolaannya dilakukan secara terpisah oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

Menurut Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Bab VIII Tentang Keuangan Dan Aset Desa Pasal 72, sumber - sumber pendapatan desa terdiri dari:

- 1) Pendapatan asli desa yang terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa hasil swadaya dan partisipasi masyarakat, hasil gotong royong dan lain-lain Pendapatan Asli Desa.
- 2) Alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- 3) Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota.
- 4) Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota.
- 5) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/ Kota.
- 6) Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.
- 7) Lain–lain pendapatan desa yang sah.

4. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Yesinia *et al.*, 2018). Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban berupa laporan dengan prinsip bahwa setiap kegiatan pengelolaan keuangan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa.

Akuntabilitas merupakan hal yang penting untuk menjamin nilai-nilai efisiensi, efektivitas dan reliabilitas dalam pelaporan keuangan desa yang berisi kegiatan mulai dari perencanaan hingga realisasi atau pelaksanaan (Perdana, 2018). Akuntabilitas merupakan hal yang penting untuk dimiliki entitas, baik entitas bisnis maupun pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada *shareholders*. Sedangkan pemerintah merupakan sebuah organisasi yang bertugas untuk melayani masyarakat (Widyatama dan Novita, 2017).

Mada, *et al.*, (2017) mengatakan bahwa sebagai pengelola sumber daya maka, masyarakat membutuhkan informasi yang terkait dengan aktivitas yang dilakukan oleh pengelola tersebut yakni pemerintah. Informasi ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat guna mengetahui seberapa

besar sumber daya yang dimiliki serta mengalokasikan sumber daya tersebut.

5. Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa

Perangkat desa ialah aparatur desa dibawah pimpinan kepala desa. Perangkat desa merupakan salah satu unsur pemerintah desa. Sebagai salah satu faktor pelaku desa, perangkat desa mempunyai peran penting tersendiri dalam membuat kemajuan bangsa melalui desa. Sumber daya manusia diartikan sebagai sumber dari kekuatan yang terdapat dalam diri manusia, dimana hal tersebut dapat didaya gunakan oleh organisasi (Indrianasari, 2017). Kompetensi yang dimiliki oleh pengelola dana desa menjadi syarat utama agar akuntabilitas desa bisa berjalan dengan maksimal. pelaksanaan pengelolaan dana desa sebagai akibat adanya desentralisasi fiskal yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dan pemerintah daerah kepada pemerintah desa dibutuhkan persiapan. Salah satu aspek yang perlu dipersiapkan adalah sumber daya manusia (Widyatama dan Novita, 2017).

Kompetensi aparatur desa mutlak diperlukan agar pengelolaan dana desa untuk pengembangan berbagai aspek dapat dicapai dengan menggunakan kecerdasan, pengetahuan dan keterampilan serta perilaku untuk mendorong pembangunan desa yang optimal. Sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas di bidang pekerjaan tertentu maka ia harus memiliki pengetahuan, keterampilan dan keahlian yang berkaitan dengan pekerjaannya (Dewi dan Gayatri ,2019).

6. Komitmen Organisasi Pemerintah Desa

Menurut Sopiah (2008:155), komitmen organisasional merupakan dimensi perilaku penting yang dapat digunakan untuk menilai kecenderungan karyawan untuk bertahan sebagai anggota organisasi. Komitmen organisasi merupakan identifikasi dan keterlibatan seseorang yang relatif kuat terhadap organisasi. Komitmen organisasi adalah keinginan anggota organisasi untuk mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi dan bersedia berusaha keras bagi pencapaian tujuan organisasi.

Menurut Robbins dan Judge (2008), komitmen organisasi adalah tingkat sampai mana seorang karyawan memihak sebuah organisasi serta tujuan-tujuan dan keinginannya untuk mempertahankan keanggotaan dalam organisasi tersebut, sehingga karyawan yakin dan menerima tujuan organisasional serta berkeinginan untuk tinggal bersama organisasi tersebut. Komitmen akan mendorong rasa percaya diri dan semangat kerja menjalankan tugas menuju perubahan ke arah yang lebih baik. Hal ini ditandai dengan peningkatan kualitas fisik dan psikologi dari hasil kerja, sehingga segala sesuatunya menjadi menyenangkan bagi orang yang menjalankannya (Suherwan dan Kalimah, 2017).

7. Partisipasi Masyarakat

Menurut Isbandi (2007), Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada dimasyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif

solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi. Menurut Pangestu (1995) terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat yaitu:

- 1) Faktor internal, mencakup karakteristik individu yang dapat mempengaruhi individu tersebut untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan. Karakteristik individu mencakup umur, tingkat pendidikan, jumlah beban keluarga, jumlah pendapatan, pengalaman berkelompok.
- 2) Faktor eksternal, meliputi hubungan yang terjalin antara pihak pengelola proyek dengan sasaran yang dapat mempengaruhi partisipasi karena sasaran akan dengan sukarela terlibat dalam suatu proyek, jika sambutan pihak pengelola positif dan menguntungkan mereka. Selain itu bila didukung dengan pelayanan pengelola kegiatan yang positif dan tepat dibutuhkan oleh sasaran. maka sasaran tersebut tidak akan ragu untuk berpartisipasi dalam proyek.

Partisipasi merupakan segala aspek kehidupan baru akan berhasil apabila merupakan kegiatan yang melibatkan seluruh anggota masyarakat untuk meningkatkan akuntabilitas sebagai tanggapan yang muncul terhadap tingginya ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Karena jarak yang lebih dekat antara pemerintah dan warga masyarakat dapat membuat pejabat publik dan pemerintah lebih bertanggung jawab (Mada, *et al.*, 2017).

8. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Teknologi Informasi merupakan kumpulan dari beberapa unsur teknologi seperti komputer, perangkat (hardware dan software), database, jaringan, dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi. (Yudianto dan Sugiarti, 2017). Pemanfaatan teknologi informasi merupakan keadaan atau sikap seorang akuntan untuk menggunakan teknologi untuk menyelesaikan tugas dan meningkatkan kinerjanya. Pemanfaatan teknologi informasi mencakup (pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik (Perdana, 2018). Pemanfaatan teknologi menjadi hal yang penting dalam mempermudah pekerjaan untuk mengelola data menjadi sebuah informasi sebagai keperluan para pemegang kepentingan untuk mengambil tindakan atau keputusan dalam memberikan pelayanan yang baik kepada publik (Aulia, 2018).

9. Sistem Pengendalian Internal

Pemerintah telah banyak mengeluarkan berbagai bentuk sistem yang seluruhnya berakhir pada tujuan untuk mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Penyelenggaraan pemerintahan tentu memiliki kegiatan yang cukup banyak dan sangat luas, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, pengawasan hingga evaluasi. Untuk mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintah yang baik, pemerintah membentuk suatu sistem yang dapat mengendalikan seluruh kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Sistem yang dimaksud adalah Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Menurut PP No. 60 tahun 2008 yang dimaksud dengan Sistem Pengendalian Internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset Negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah sistem pengendalian internal yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sedangkan pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan audit, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

B. Telaah Penelitian Sebelumnya

Tabel 2.1
Tabel Penelitian Sebelumnya

No	Penulis	Judul	Hasil Penelitian
1	Dewi dan Gayatri (2019)	Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.	Kompetensi perangkat desa, Kepemimpinan Kepala Desa dan Partisipasi masyarakat memiliki pengaruh positif pada Akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Tabel 2.1
Tabel Penelitian Sebelumnya
(Lanjutan)

No	Penulis	Judul	Hasil Penelitian
2	Aulia (2018)	Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten 50 Kota	Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Partisipasi Masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas pengelolaan dana desa
3	Perdana (2018)	Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Bantul.	Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat dan Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.
4	Yesinia <i>et al.</i> , (2018)	Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus pada Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang).	Terdapat pengaruh positif dari peran perangkat desa dan sistem pengendalian internal terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Dana Desa.
5	Suherwan dan Kamaliah (2018)	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Implementasi Alokasi Dana Desa (Add). (Studi Kasus Di Kecamatan Siantan Selatan Kabupaten Kepulauan Anambas).	Sumber daya manusia(SDM), Komitmen dan Perangkat Pendukung Lain berpengaruh terhadap keberhasilan Implementasi Alokasi Dana Desa

Tabel 2.1
Tabel Penelitian Sebelumnya
(Lanjutan)

No	Penulis	Judul	Hasil Penelitian
6	Rosyidi (2018)	Pengaruh Transparansi, Kompetensi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa.	Transparansi, Kompetensi dan Sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa.
7	Widyatama dan Novita (2017)	Pengaruh Kompetensi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (di Kabupaten Sigi).	Kompetensi Aparatur dari Pemerintah Desa tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas dana desa. Sistem Pengendalian Aparatur mempengaruhi Akuntabilitas alokasi Dana Desa (ADD).
8	Mada, <i>et al.</i> , (2017)	Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Gorontalo.	Kompetensi aparat pengelola dana desa, Komitmen organisasi pemerintah desa dan Partisipasi masyarakat memberikan pengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa
9	Abubakar, <i>et al.</i> , (2017)	The Effectiveness of Internal Control Activity on Financial Accountability and Transparency in Local Government Areas of Borno State. Nigeria	Kegiatan pengendalian internal tidak berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas keuangan di pemerintah daerah wilayah negara Borno
10	Setiana dan Yuliani (2017)	Pengaruh Pemahaman dan Peran Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Peran perangkat desa berpengaruh dan Pemahaman perangkat desa tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Tabel 2.1
Tabel Penelitian Sebelumnya
(Lanjutan)

No	Penulis	Judul	Hasil Penelitian
11	Riandani (2017)	Pengaruh kompetensi sdm, pemanfaatan teknologi Informasi, dan pengendalian intern terhadap Akuntabilitas laporan keuangan	Kompetensi SDM, dan Pengendalian Intern berpengaruh positif sedangkan Pemanfaatan Teknologi Informasi tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan.
12	Komarasari (2017)	Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Daerah	Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Pengendalian Intern Akuntansi memberikan pengaruh positif terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Daerah
13	Mudarosatun, Niken Indah (2017)	Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa. Studi Pada Kantor Desa Di Kabupaten Ponorogo	Sumber daya aparatur dan Transparansi berpengaruh positif sedangkan Partisipasi Masyarakat tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.
14	S Putu, D., & Rosiana, K. 2016	Governance Dan Pengalaman Kerja Pada Kualitas Audit Desa	Governance dan Pengalaman Kerja berpengaruh positif terhadap Kualitas Audit Desa.

C. Perumusan hipotesis

1. Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

Kompetensi aparat pengelola dana desa merupakan suatu keahlian mutlak yang diperlukan aparatur desa agar pengelolaan dana desa untuk pengembangan berbagai aspek dapat dicapai dengan menggunakan kecerdasan, pengetahuan dan keterampilan serta perilaku untuk mendorong pembangunan desa yang optimal (Perdana, 2018). Perangkat desa dengan kompetensi yang memadai akan mendukung keberhasilan pengelolaan dana desa. Pemerintah desa sebagai *steward* harus mampu patuh terhadap aturan terkait pengelolaan dana desa, terlebih jumlah dana desa yang diterima desa selalu meningkat setiap tahun dan diawasi secara ketat oleh pemerintah pusat. Pengelolaan dana desa masih memiliki banyak kendala dalam pelaksanaannya, salah satunya dari faktor sumber daya manusia (Dewi dan Gayatri, 2019).

Kompetensi berpengaruh positif pada pengelolaan laporan keuangan dana desa. Aparat yang kompeten akan menghasilkan *output* yang baik sesuai dengan prinsip akuntabilitas. Sejalan dengan teori *stewardship*, aparat yang bertugas sebagai pelayan memiliki kewajiban untuk melayani kepada masyarakat sebagai wujud akuntabilitas. Sehingga pada saat pengambilan keputusan dalam penggunaan dana desa akan menghasilkan keputusan yang terbaik guna memberikan pelayanan yang terbaik sesuai dengan tugas yang diharapkan.

Penelitian Mada *et al.*, (2017), menyatakan bahwa kompetensi aparat pengelola dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, yang berarti bahwa semakin kompeten aparat pengelola dana desa maka pengelolaan dana desa semakin akuntabel. Dengan beroperanya perangkat desa maka pengelolaan dana desa akan berkualitas baik dan transparan (Setiana dan Yuliani, 2017). Didukung oleh penelitian yang dilakukan Rosyidi (2018), Dewi dan Gayatri (2019) yang menyatakan bahwa semakin banyak aparatur desa yang memiliki kompetensi didalam bidangnya maka semakin tinggi tingkat kepercayaan pemerintah serta masyarakat terhadap pengalokasian dana desa. Kompetensi yang memadai dari perangkat desa dapat meningkatkan akuntabilitas yang pada akhirnya dapat membantu pemerintah desa dalam menerapkan mekanisme kontrolnya (Supadmi dan Dharma, 2018). Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian ini sebagai berikut:

H1. Kompetensi aparat pengelola dana desa berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas pengelolaan dana desa.

2. Pengaruh Komitmen Organisasi Pemerintah Desa terhadap Akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Komitmen Organisasi adalah suatu fenomena yang berhubungan perilaku kewarganegaraan, prestasi dan produktivitas. Adanya komitmen organisasi diharapkan dapat mendukung pengelolaan dana desa sehingga mampu melaksanakan program kegiatan dengan baik. Komitmen organisasi merupakan alat psikologis dalam menjalankan organisasinya untuk

pencapaian sasaran yang diharapkan. Semakin baik komitmen organisasi akan mendorong keberhasilan akuntabilitas publik termasuk akuntabilitas keuangan (Mada *et al.*, 2017). Faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan yang akuntabel dan transparan adalah komitmen aparatur karena inti dari komitmen dari suatu pemerintah tercermin dalam keterikatan dan loyalitas seorang pegawai kepada organisasinya yang akan mendorong mereka untuk selalu bekerja dalam berbagai situasi (Suherwan dan Kamaliah, 2018).

Pengelolaan anggaran dana desa yang dilakukan aparatur dengan tujuan melayani publik harus dipertanggungjawabkan dengan baik. Pertanggungjawaban ini merupakan wujud dari akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Hal ini sejalan dengan teori *stewardship*, aparatur pengelola dana desa harus memiliki komitmen yang tinggi terhadap organisasi untuk memenuhi kewajibannya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kewajiban sebuah organisasi atau institusi adalah memberikan pertanggungjawaban dari segala aktivitas dalam mengelola anggaran yang secara langsung pertanggungjawaban tersebut dilakukan oleh aparatur sebagai penggerak organisasi. Prinsip komitmen juga ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi.

Penelitian Mada *et al.*, (2017) yang menyatakan bahwa organisasi dibentuk untuk mencapai tujuan tertentu dengan mengelola sumber daya atau anggaran yang telah disediakan oleh masyarakat. Akuntabilitas pengelolaan dana desa akan terwujud dengan komitmen organisasi

pemerintah desa yang baik, dikarenakan aparatur yang terdapat didalam organisasi atau institusi memiliki rasa keterlibatan dan kepuasan hidup dalam bekerja untuk mencapai tujuan organisasi. Penyelarasan tujuan organisasi dan aparatur dapat terwujud dengan komitmen organisasi yang tinggi (Perdana, 2018). Didukung dengan penelitian Suherwan dan Kamaliah (2018) mengemukakan bahwa komitmen organisasi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2. Komitmen Organisasi pemerintah desa berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas pengelolaan dana desa.

3. Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Partisipasi Masyarakat adalah hal yang diperlukan untuk mewujudkan pembangunan desa yang sesuai dengan kebutuhan desa itu sendiri. Partisipasi masyarakat bukan hanya melibatkan masyarakat dalam pembuatan keputusan di setiap program pembangunan, namun masyarakat juga dilibatkan dalam mengidentifikasi masalah dan potensi yang ada di masyarakat (Perdana, 2018). Pengelolaan dana desa membutuhkan partisipasi masyarakat, sebab prioritas penggunaan dana desa salah satunya adalah pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat hanya mampu tercapai apabila masyarakat turut berpartisipasi aktif dalam kegiatan desa. Partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi

keberhasilan dari program pembangunan maupun pengembangan masyarakat pedesaan (Aulia, 2018).

Hal ini sejalan dengan teori teori *stewardship*, bentuk akuntabilitas yang dilakukan pemerintah desa dengan memberikan pertanggungjawaban segala aktivitas kepada pihak masyarakat akan menimbulkan *responsiveness* kepada masyarakat. Responsif ini dimaksudkan untuk memperoleh tanggapan dari masyarakat untuk menilai kegiatan maupun kinerja dari pemerintah dalam hal kesesuaian dengan harapan atau permintaan masyarakat. Dimensi responsif ini berhubungan dengan keterlibatan masyarakat yang dapat memberikan tanggapan atau masukan dalam hal meningkatkan pembangunan dan pengambilan keputusan untuk kedepannya.

Penelitian Dewi dan Gayatri (2019), menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dapat meningkatkan pembangunan desa. Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan mengingat sensitivitas pengelolaan dana desa yang rentan terhadap penyelewengan. Keberhasilan penyelenggaraan pengelolaan dana desa tidak terlepas dari partisipasi aktif masyarakat desa sebagai bagian integral dari sistem pemerintahan. Sejalan dengan penelitian Mada *et al.*, (2017) mengemukakan bahwa partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa. Didukung oleh penelitian Perdana (2018) yang menyatakan pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh aparat ditujukan untuk mewujudkan pelayanan kepada publik, sehingga masyarakat yang diberikan pelayanan harus ikut serta

dalam menyelenggaran pengelolaan dana desa yang lebih baik. Semakin tinggi partisipasi yang dilakukan masyarakat akan semakin baik pula akuntabilitas pengelolaanya. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3. Partisipasi Masyarakat berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas pengelolaan dana desa.

4. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

Teknologi Informasi adalah sekumpulan perangkat yang dapat digunakan untuk mengolah data dan menyampaikan informasi kepada masyarakat dan juga dapat mempermudah pekerjaan para aparatur dalam mengelola dana desa. Pengelolaan dana yang dilakukan oleh pemerintah harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan prinsip akuntabilitas (Perdana, 2018). Pemanfaatan teknologi informasi adalah manfaat yang diharapkan oleh pengguna teknologi informasi dalam melaksanakan tugasnya. Pemanfaatan teknologi informasi akan sangat membantu mempercepat proses pengelolaan data transaksi dan penyajian laporan keuangan dan meminimalisasi berbagai kesalahan karena semua aktivitas pengelolaan keuangan akan tercatat secara lebih sistematis (Ariesta, 2013).

Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan dana desa akan mempermudah aparatur dalam mengolah dan mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilakukan kepada masyarakat. Hal ini sesuai dengan teori *stewardship*, dengan memanfaatkan teknologi informasi secara langsung

aparatur lebih terbantu dalam pengelolaan dana desa, sehingga aparatur akan dengan mudah menjalankan kewajibannya sebagai pemberi pelayanan sebagai wujud akuntabilitas kepada masyarakat.

Penelitian yang dilakukan Aulia, (2018) mengemukakan bahwa Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Artinya semakin bagus pemanfaatan teknologi informasi, maka pengelolaan dana desa semakin akuntabel. Pengelolaan desa yang baik dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi yang sangat pesat kemajuannya, dengan memanfaatkan kemajuan teknologi maka informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat dapat tersedia dengan cepat dan akurat, tidak hanya masyarakat yang dengan mudah mendapatkan informasi pemerintah pusat juga dapat dengan mudah memperoleh informasi guna meningkatkan potensi yang ada di desa (Perdana, 2018). Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H4. Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas pengelolaan dana desa.

5. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

Sistem pengendalian internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan

terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern bagian dari proses untuk mewujudkan akuntabilitas pemerintahan publik (Yesinia *et al.*, 2018). Penyelenggaraan kegiatan dalam suatu pemerintah mulai dari perencanaan, pelaksanaan pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban harus dilaksanakan secara tertib, terkendali serta efisien dan efektif. Untuk itu dibutuhkan suatu sistem yang dapat memberi keyakinan memadai bahwa penyelenggaraan kegiatan pada suatu instansi pemerintah dapat mencapai tujuannya secara efisien dan efektif, melaporkan pengelolaan keuangan secara andal, mengamankan aset dan mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem ini dikenal sebagai sistem pengendalian internal (Widyatama dan Novita, 2017).

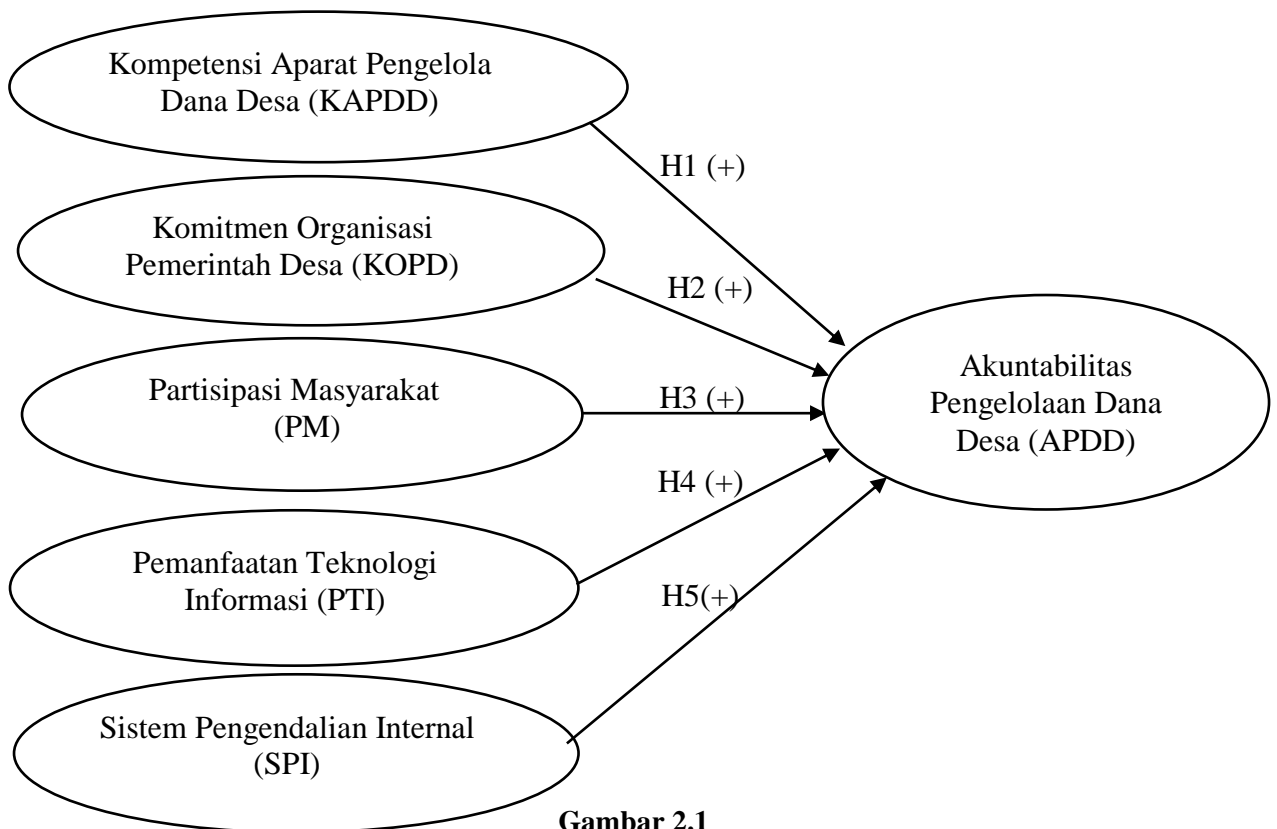
Sistem pengendalian internal dalam pemerintahan merupakan faktor yang penting, karena dengan adanya sistem pengendalian dapat mempengaruhi pengambilan keputusan internal pemerintah desa, sehingga berimplikasi pada akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa tersebut. Sebagai *steward* pemerintah desa dapat mengarahkan semua kemampuan dan keahliannya dalam mengefektifkan pengendalian internal agar menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Penelitian Rosyidi (2018) menyatakan bahwa sistem pengendalian aparatur dari pemerintah desa memberikan pengaruh positif terhadap akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa, karena pengawasan pemerintah meningkatkan akuntabilitas keuangan melalui evaluasi dan perbaikan

pengendalian internal, manajemen risiko dan proses tata kelola pemerintahan. Riset sebelumnya yang dilakukan oleh Widyatama dan Novita (2017) dan Yesinia *et al.*, (2018) juga menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan.. Berdasarkan uraian tersebut. maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H5. Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas pengelolaan dana desa.

D. Model Penelitian



Gambar 2.1
Model Penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Populasi dan Sampel

Populasi dapat didefinisikan sebagai himpunan atau sekumpulan elemen, unsur atau unit dalam suatu kawasan atau ruang lingkup tertentu yang memiliki atribut atau karakteristik tertentu dan ditetapkan oleh peneliti sebagai objek analisis penelitian (Wahyudin, 2015: 116). Populasi dalam penelitian ini adalah Pemerintah Desa di Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang yaitu sebanyak 14 Desa di Kecamatan Bandongan yang mendapatkan dana desa.

Sampel adalah cuplikan yang diambil dari populasi dan menjadi wakil populasi (Wahyudin, 2015: 118). Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dilakukan secara *purposive sampling*. Kriteria sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Perangkat desa yang terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, kepala urusan keuangan, kepala urusan tata usaha dan umum, kaur perencanaan, kasi pemerintahan, kasi kesra, kasi pelayanan, kasi kesejahteraan dan kepala dusun.
2. Memiliki masa kerja minimal 1 tahun dan tingkat pendidikan minimal SMA/SLTA sederajat.

B. Data Penelitian

1. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan metode yang dipilih yaitu metode pendekatan kuantitatif yaitu memperoleh data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan Sugiyono (2017:8). Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer. Data primer yaitu data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli dan data dikumpulkan secara khusus untuk menjawab pertanyaan penelitian yang sesuai dengan keinginan peneliti. Data primer data berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok tentang variabel-variabel yang berhubungan dengan penelitian Sugiyono (2017:8).

2. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan teknik survey yaitu dengan memberikan kuesioner yang langsung diserahkan kepada kriteria responden di desa se-Kecamatan Bandongan. Kuesioner yang telah diisi oleh responden diseleksi terlebih dahulu agar kuesioner yang tidak lengkap pengisiannya tidak disertakan dalam analisis. Peneliti ini memilih cara demikian dengan pengembangan bahwa metode survey langsung lebih efektif dan mengurangi resiko tidak kembalinya kuesioner yang telah disebar.

C. Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel

Tabel 3.1
Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi Operasional	Pengukuran
Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa	Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa adalah hal yang mutlak diperlukan agar pengelolaan dana desa untuk pengembangan berbagai aspek dapat dicapai dengan menggunakan kecerdasan, pengetahuan dan keterampilan serta perilaku untuk mendorong pembangunan desa yang optimal, (Mada et al., 2017).	Mengacu pada penelitian yang dikembangkan oleh Mada et al., (2017), dengan indikator: 1. Pengetahuan 2. Kemamuan untuk meningkatkan pengetahuan 3. Keahlian Teknis 4. Kemampuan mencari solusi 5. Inisiatif dalam bekerja 6. Keramahan dan kesopanan Diukur dengan menggunakan skala <i>likert</i> 5 poin, yaitu skala 1 = Sangat Tidak Setuju sampai skala 5 = Sangat Setuju
Komitmen Organisasi Pemerintah Desa	Komitmen Organisasi adalah Orientasi individu terhadap kerja yang menunjukkan bahwa individu selalu memikirkan pekerjaan, dimana pekerjaan ini memberikan kepuasan hidup dan status bagi kehidupan di pemerintahan desa, (Suherwan dan Kamaliah 2018).	Mengacu pada penelitian yang dikembangkan oleh Mada et al., (2017), dengan indikator: 1. Keyakinan terhadap tujuan organisasi 2. Perasaan memiliki organisasi 3. Mempertahankan keanggotaan organisasi 4. Kesetiaan dalam organisasi 5. Kesiediaan mengerahkan upaya atas nama organisasi Diukur dengan menggunakan skala <i>likert</i> 5 poin, yaitu skala 1 = Sangat Tidak Setuju sampai skala 5

Tabel 3.1
Definisi Operasional Variabel
(Lanjutan)

Variabel	Definisi Operasional	Pengukuran
Partisipasi Masyarakat	Partisipasi Masyarakat merupakan keterlibatan seorang individu secara sadar dalam kegiatan tertentu dan kondisi tertentu, yang terjadi antara individu dengan individu yang lain ataupun individu dengan kelompok melalui berbagai cara dan berbagai segala macam informasi, (Mada et al., 2017)	Mengacu pada penelitian yang dikembangkan oleh (Mada et al., 2017), dengan indikator: <ol style="list-style-type: none"> 1. Keterlibatan dalam pengambilan keputusan program-program desa 2. Mengusulkan rencana anggaran 3. Terlibat dalam rapat paripurna 4. Terlibat mengawasi dan melaporkan 5. Memberikan penilaian pelaksanaan anggaran 6. Memberikan penghargaan. Diukur dengan menggunakan skala <i>likert</i> 5 poin, yaitu skala 1 = Sangat Tidak Setuju sampai skala 5
Pemanfaatan Teknologi Informasi	Teknologi informasi merupakan kumpulan dari beberapa unsur teknologi seperti komputer, perangkat (hardware dan software), database, jaringan, dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi Pemanfaatan teknologi informasi merupakan keadaan atau sikap seorang akuntan untuk menggunakan teknologi untuk menyelesaikan tugas dan meningkatkan kinerjanya. (Perdana, 2018)	Mengacu pada penelitian yang dikembangkan oleh W. Komarasari (2017), dengan indikator: <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya software pendukung 2. Ketersediaan jaringan internet 3. dimanfaatkan sesuai ketentuan 4. proses terkomputerisasi Diukur dengan menggunakan skala <i>likert</i> 5 poin, yaitu skala 1 = Sangat Tidak Setuju sampai skala 5

Tabel 3.1
Definisi Operasional Variabel
(Lanjutan)

Variabel	Definisi Operasional	Pengukuran
Sistem Pengendalian Internal	Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien. keandalan pelaporan keuangan. pengamanan aset negara. dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. (SPIP PP No. 60 tahun 2008)	Mengacu pada SPIP PP No. 60 Tahun 2008 dengan indikator: 1. lingkungan pengendalian 2. penilaian risiko 3. kegiatan pengendalian 4. informasi dan komunikasi 5. pemantauan pengendalian intern. Diukur dengan menggunakan skala <i>likert</i> 5 poin, yaitu skala 1 = Sangat Tidak Setuju sampai skala 5 = Sangat Setuju
Akuntabilitas dana desa	kewajiban yang dimiliki oleh individu yang diamanati mengelola sumber daya dengan cara mempertanggungjawabkan dan menerangkan kinerja individu, badan hukum, maupun pemimpin kepada yang memiliki hak untuk menerimaertanggungjawaban dan keterangan (Mada et al., 2017),	Mengacu pada penelitian yang dikembangkan oleh Mada et al., (2017), dengan indikator: 1. Kejujuran dan keterbukaan informasi 2. Kepatuhan dalam pelaporan 3. Kesesuaian prosedur 4. Kecukupan informasi 5. Ketepatan penyampaian laporan Diukur dengan menggunakan skala <i>likert</i> 5 poin, yaitu skala 1 = Sangat Tidak Setuju sampai skala 5

D. Metode Analisis Data

1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif ini digunakan untuk memberikan gambaran mengenai demografi responden penelitian (nama responden, jenis kelamin,

umur, jenjang Pendidikan, tingkat jabatan dan lama masa kerja). Penelitian juga menggunakan statistik deskriptif yang terdiri dari mean, deviasi standar, minimum dan maksimum (Ghozali 2018).

2. Uji Kualitas Data

a. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid dan tidaknya suatu kuesioner. Kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali 2018). Menguji validitas dengan *Confirmatory Factor Analysis* (CFA). *Confirmatory Factor Analysis* digunakan untuk menguji apakah suatu variabel mempunyai unidimensionalitas atau apakah indikator-indikator yang digunakan data mengkonfirmasi sebuah variabel. Analisis faktor konfirmasi dapat menguji apakah indikator benar-benar merupakan indikator dari variabel tersebut. Analisis faktor konfirmatori akan mengelompokkan masing-masing indikator ke dalam beberapa faktor apabila indikator yang digunakan merupakan indikator konstruk. kemudian akan mengelompokkan menjadi satu dengan faktor loading yang tinggi.

Ketika pada pengelompokan terdapat dalam menginterpretasikan maka perlu dilakukan rotasi. Alat penting untuk interpretasi faktor adalah *factor rotation*. Rotasi Ortogonal melakukan rotasi dengan sudut 90 derajat. sedangkan rotasi yang tidak 90 derajat disebut *oblique rotation*. Rotasi

orthogonal dapat berbentuk *Quartimax*, *Varimax*, *Equimax* dan *Promax* (Ghozali 2018).

Asumsi yang mendasari data tidaknya digunakan analisis faktor adalah data matrik harus memiliki korelasi yang cukup (*sufficient correlation*). Uji *Bartlett of Sphericity* meruakan uji statistik untuk menentukan ada tidaknya korelasi antar variabel. Semakin besar samel menyebabkan *Bartlett test* semakin sensitive untuk mendeteksi adanya korelasi antara variabel. Alat uji lain yang digunakan untuk mengukur tingkat *interkorelasi* antar variabel dan dapat tidaknya dilakukan anaisis faktor adalah *Kaiser Neyer Olkin Measure Of Samling Adequacy* (KMO MSA). Nilai KMO bervariasi dari 0 sampai dengan 1. Nilai yang dikehendaki harus > 0.50 dan *cross loading* > 0.50 untuk data dilakukan analisis faktor (Ghozali 2018).

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh hasil pengukuran tetap konsisten apabila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhada gejala yang sama dengan menggunakan alat ukur yang sama. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan *Cronbach`s alpha*. Koefisien *Cronbach`s alpha* yang lebih besar dari 0.70 atau 70% factor, (Ghozali 2018).

3. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis ini dimaksudkan untuk mengungkapkan pengaruh antara beberapa variabel bebas dengan variabel terikat. Persamaan regresi linear berganda. dalam penelitian ini sebagai berikut:

$$APDD = \alpha + \beta_1 \text{ KAPDD} + \beta_2 \text{ KOPD} + \beta_3 \text{ PM} + \beta_4 \text{ PTI} + \beta_5 \text{ SPI} + e$$

Keterangan:

APDD	= Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa
α	= Konstanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5$	= Koefisien regresi
KAPDD	= Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa
KOPD	= Komitmen Organisasi Pemerintah Desa
PM	= Partisipasi Masyarakat
PTI	= Pemanfaatan Teknologi Informasi
SPI	= Sistem Pengendalian Internal
ε	= Standar error

4. Pengujian Hipotesis

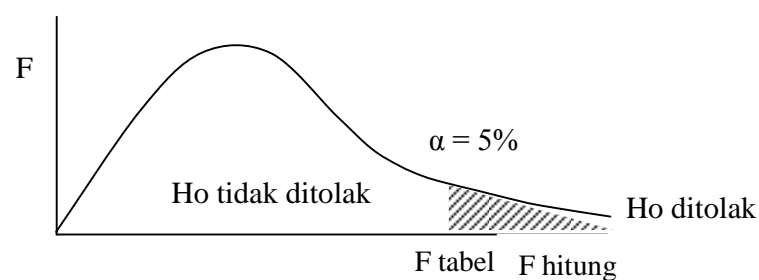
a. Koefisien Determinasi ($Adj R^2$)

Menurut Ghozali (2018), koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Nilai koefisien determinasi adalah nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

b. Uji kelayakan model (uji F)

Menurut Ghozali (2018), Uji F pada dasarnya dilakukan untuk mengukur ketepatan fungsi regresi sampel antara hasil pengamatan (frekuensi pengamatan) tertentu dengan frekuensi yang diperoleh berdasarkan nilai harapannya (frekuensi teoretis). Uji F menguji apakah variabel independen mampu menjelaskan variabel secara baik atau untuk menguji apakah model yang digunakan *fit* atau tidak. Menentukan F tabel digunakan tingkat signifikansi 5% dengan derajat kebebasan pembilang (df_1) = $k-1$ dan derajat kebebasan penyebut (df_2) = $n-k$, dimana k adalah jumlah variabel bebas. Pengujian dilakukan dengan kriteria:

- 1) Jika $F_{hitung} > F_{Tabel}$ atau $p\ value < \alpha = 0.05$. artinya model yang digunakan bagus (fit)
- 2) Jika $F_{hitung} < F_{Tabel}$ atau $p\ value > \alpha = 0.05$. artinya model yang digunakan tidak bagus (tidak fit)



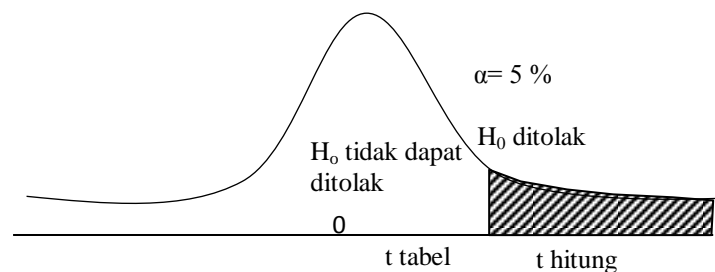
Gambar 3.1
Penerimaan Uji F

c. Uji t

Uji t digunakan untuk menguji hipotesis seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen Ghozali (2018). Alpha

(α) yang digunakan adalah 5 persen (0.05). Proses pengujian ini dilakukan berdasarkan t hitung dengan tingkat kepercayaan 5 %. Ketentuan yang digunakan dalam analisis ini adalah *level of significance* 0.05 dengan derajat keterbatasan $df = n-1$. Kriteria penerimaan hipotesis positif:

- 1) Jika t hitung $>$ t tabel atau p value $<$ $\alpha = 0.05$ maka H_0 ditolak atau H_a diterima. Artinya variabel independen mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen.
- 2) Jika t hitung $<$ t tabel atau p value $>$ $\alpha = 0.05$ maka H_0 tidak ditolak atau H_a tidak diterima. Artinya variabel independen tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen.



Gambar 3.2
Penerimaan Uji t

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Sampel yang diambil dengan menggunakan *purposive sampling* dan diperoleh 105 kuesioner yang dapat diolah. Hasil *Adjust R Square* menunjukkan bahwa variabel Kompetensi Aparat Pengelolaan Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Internal menjelaskan Akuntabilitas Dana Desa sebesar 15,4% sedangkan sisanya 84,6% dipengaruhi oleh variabel atau faktor lain yang tidak diteliti atau diluar model regresi penelitian ini.

Berdasarkan hasil uji statistik F menunjukkan bahwa F hitung lebih besar dari F tabel, yang artinya model yang digunakan sudah baik. Sedangkan hasil uji t menunjukkan bahwa Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif, sedangkan Kompetensi Aparat Pengelolaan Dana Desa, dan Sistem Pengendalian Internal tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Dana Desa.

B. Keterbatasan

1. Penelitian ini menggunakan objek penelitian di Desa se-Kecamatan Bandongan, sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan ke semua objek mengenai Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.
2. Berdasarkan hasil *Adjust R Square*, bahwa variabel yang digunakan menjelaskan Akuntabilitas Dana Desa sebesar 15,4% sehingga masih terdapat variabel lain yang mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.
3. Berdasarkan uji validitas, terdapat 40% instrumen yang tidak valid, sehingga indikator dari variabel yang digunakan dalam penelitian ini belum mencerminkan indikator yang sesuai dengan konstruksinya.

C. Saran

Memperhatikan beberapa keterbatasan penelitian yang telah disampaikan, maka saran yang dapat diberikan sebagai pertimbangan bagi penelitian selanjutnya, antara lain:

1. Penelitian selanjutnya dapat memperluas objek penelitian, misalnya desa di Kecamatan lain di Kabupaten Magelang sehingga dapat dijadikan generalisasi ke semua objek mengenai Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.
2. Penelitian selanjutnya perlu menambahkan variabel lain yang dapat mempengaruhi akuntabilitas dana desa seperti karakteristik pembangunan desa karena ada hubungan antara karakteristik pembangunan desa dengan

akuntabilitas dana desa. Semakin desa itu maju maka semakin baik akuntabilitas dana desa, Riandani (2017). Indikator dan karakteristik pembangunan desa sebagai basis implementasi atas undang-undang desa.

3. Penelitian selanjutnya diharapkan untuk menambah dan memperbaiki pernyataan-pernyataan yang ada dalam kuesioner, serta melakukan uji *pilot test* sebelum melakukan penyebaran kuesioner. Sehingga kuesioner yang akan digunakan selanjutnya memiliki tingkat validitas dan reabilitas yang tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, A. A., Dibal, N. A., Amade, P., & Joyce, P. 2017. Effect of Internal Control Activity on Financial Accountability and Transparency in Local Government Areas of Borno State, Nigeria. *European Journal of Business and Management Wwww.Iiste.Org ISSN*, 9(30), 58–65. Retrieved from www.iiste.org
- Ariesta, Fadila .2013. Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan SistemPengendalian Intern TerhadapKeandalan Dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah (Studi Empiris Pada Pemerintah KotaPadang). *Jurnal*, Universitas Negeri Padang.
- Arifiyanto, Dwi dan Taufik . 2014. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*. Universitas Jember.
- Aulia, P. 2018. Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa . *JOM FEB Riau University, Pekanbaru, Indonesia*, 1(3) ISSN 2339-0492.
- Dewi, Ni Komang dan Gayatri 2019. Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 26, 4549–4556.
- Donaldson, & Davis, J. H. 1991. *Stewardship theory or agency theory: CEO governance and shareholder returns*. *Australian Journal of Management*, 16: 49-64.
- Dwi Setiana, N., & Laila Yuliani, N. 2017. Pengaruh Pemahaman dan Peran Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *University Research Colloquium*, 205–210.
- Ghozali, Imam. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 2*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Heider, Fritz. 1958. *The Ppsychology of Interpersonal Relations*. New York: Wiley.
- Husna,Saifatul. Dan Abdullah. 2016. Kesiapan Aparatur Desa Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa Secara Akuntabilitas Sesuai Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi pada Beberapa Desa di Kabupaten Pidie). Universitas Syiah Kuala. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)Vol. 1, No. 1, Halaman 282-293*

<http://www.kemendesa.go.id>

Indrianasari, Neny Tri. 2017. Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. *ASSETS: Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi, Keuangan dan Pajak*, 1(2), 29-46.

inspektorat.magelangkab.go.id

Isbandi, Rukminto. 2007. *Perencanaan partisipatoris berbasis asset komunitas: dari pemikiran menuju penerapan*. Depok: FISIP UI Press.

Ivan, Yudianto dan Ekasari sugiarti. 2017. Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah (SPIP) Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Survei Pada Desa-Desa di Wilayah Kecamatan Klari. Kecamatan Karawang Timur. Kecamatan Majalaya dan Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang). Universitas Padjadjaran. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan ISSN 0216-0838*

Jensen, Michael C. dan W.H. Meckling. 1976. Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics* 3. hal. 305-360.

Komarasari. 2017. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Daerah (Pada SKPD Kabupaten Bantul Bagian Akuntansi dan Keuangan). *Jurnal Akuntansi, Repository UPY*.

Suherwan dan Kamaliah. 2018. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Implementasi Alokasi Dana Desa (Add)(Studi Kasus Di Kecamatan Siantan Selatan Kabupaten Kepulauan Anambas). *Jurnal Tepak Manajemen Bisnis*. 9(2). 201-214.

Mada, Sarifudin, Intje Kalangi, H. G. 2017. Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Gorontalo. *Akuntansi Universitas Sam Ratulangi*, 3(1), 11-15.

Muhammad Rosyidi. 2018. Pengendalian Internal Terhadap Dana Desa (Studi Empiris Pada Seluruh Desa Di Kecamatan Salo Kabupaten Kampar). *JOM FEB Riau University, Pekanbaru, Indonesia*, 1(1), 1-14.

Mathis dan Jackson. 2010. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Penerjemah Jimi Sadeli dan Bayu Prawire, Jakarta: Penerbit PT. Salemba Empat

- Naimah. 2017. Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Keuangan Desa Pada Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai. Tesis Magister Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Mudarosaton, Niken Indah. 2017. Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitaspengelolaan Alokasi Dana Desa. Studi Pada Kantor Desa Di Kabupaten Ponorogo. *Jurnal akuntansi , Universitas Muhammadiyah Ponorogo*
- Oktria, Felinda. 2018. Analisis Gaya Kepemimpinan Politik Mahyeldi Ansharullah Sebagai Walikota Padang Periode 2014-2019 (Doctoral dissertation, Universitas Andalas).
- Pangestu. 1995. Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Kegiatan Perhutanan Sosial (Studi Kasus di KPH Cianjur, Jawa Barat). Tesis. Institut Pertanian Bogor
- Perdana, Khaeril. 2018. Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa. Komitmen Organisasi Pemerintah Desa. Partisipasi Masyarakat. Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Bantul.).*Jurnal Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Bupati Kab. Magelang No.14 Tahun 2018 tentang Tata-Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2018.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).
- PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- Putu, D., & Rosiana, K. 2016. Good Governance Dan Pengalaman Kerja Pada Kualitas Audit. *E- jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali , 14, 604–634.*
- Ratu, Noldy Imanuel, Sari, Maria Mediatrix Ratna, dan Putri. 2018. Kecerdasan Spiritual Memoderasi Gaya Kepemimpinan Dan Budaya Organisasi Pada

Kinerja Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 57-86.

Riandani, riedy . 2017. Pengaruh kompetensi sdm, pemanfaatan teknologi Informasi, dan pengendalian intern terhadap Akuntabilitaslaporan keuangan.*Jurnal Ekonomi Universitas Negeri Padang*

Robbins & Judge . 2008.*Perilaku Organisasi Buku 2*. Jakarta.Salemba Empat Hal 38.

Rosyidi, Muhamad, Nur Azlina dan Adhitya Agri Putra. 2018. Pengaruh Transparansi. Kompetensi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Empiris Pada Seluruh Desa Di Kecamatan Salo Kabupaten Kampar). *Jurnal Online Mahasiswa (Jom) Bidang Ilmu Ekonomi*. 1(1). 1-14.

semarang.bpk.go.id

Setiana, Novindra dan Nur Laila Yuliani. 2017. Pengaruh Pemahaman dan Peran Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis, issn 2407-9189 Universitas Muhammadiyah Magelang*.

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : CV .Alfabeta

Sukrisno Agoes. 2012. *Auditing* (pertunjuk praktis pemeriksaan akuntan oleh akuntan public. Edisi keempat, Salemba Empat.

Sopiah. 2008. *Perilaku Organisasional*. Andi. Yogyakarta

Suherwan dan Kamaliah. 2018. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Implementasi Alokasi Dana Desa (Add)(Studi Kasus Di Kecamatan Siantan Selatan Kabupaten Kepulauan Anambas). *Jurnal Tepak Manajemen Bisnis*. 9(2). 201-214.

Supadmi dan Suputra. 2018. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia. Kejelasan Sasaran anggaran dan Sistem Pelaporan Keuangan Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kota Denpasar.*Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*.Vol 13.

Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa bahwa Alokasi Dana Desa (ADD)

Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Pasal 18 Tentang Desa.

- Vincentius Jyestha Candraditya, Johnson. 2017. 4 Faktor Penyebab Adanya Korupsi Dana Desa Versi ICW. *Tribunnews.com*
- Yadnya, Yuniarta.& Sinarwati. 2017. Pengaruh Sumber Daya Manusia. Pemanfaatan Teknologi Informasi. Dan Pengendalian Intern Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah (Studi Kasus Pada Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*. 8.
- Yesinia, Nur ida, Yuliarti & Puspitasari. D. 2018. Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Pada Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang). *Jurnal Aset (Akuntansi Riset)*. 10(1). 105-112
- Yudianto, I., & Sugiarti, E. 2017. Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah (SPIP) Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Survei Pada Desa-Desa di Wilayah Kecamatan Klari, Kecamatan Karawang Timur, Kecamatan Majalaya dan Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 17(1), 1–18.
- Wahyudin. 2015. *Perencanaan Pembangunan Desa*. Jakarta : Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia
- Widyatama, A., & Novita, L. (2017). Pengaruh Kompetensi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD). *Jurnal Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 02(02), 1–20.